

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024***EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK****(Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat)**Bhakti Yuhandika<sup>1</sup>Danny Permana<sup>2</sup>Indra Kristian<sup>3</sup>***1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani***

Email Korespondensi : bhaktidika25@gmail.com

**Abstrak**

Pengembangan pasar tidak dapat dipisahkan dari upaya kebijakan dalam penanganannya dengan melaksanakan manajemen, penataan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan pasar, namun hal ini masih jauh dari optimal sehingga pengembangan pasar masih belum dilaksanakan sesuai dengan pengembangan pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dalam Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Kecamatan Padalarang tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kebijakan termasuk Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Keteraturan, Responsivitas, dan Akurasi guna mencapai pengembangan pasar yang sukses. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat belum optimal, di mana pengaturan penyediaan lokasi lapak dan kios belum tepat sasaran karena jauh dari tempat orang berbelanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi Pasar Modren di Kecamatan Padalarang belum sesuai dengan lokasi yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga banyak pedagang yang berjualan di lokasi lain karena jauh dari jangkauan pengunjung, dan tidak ada pengawasan dan sanksi yang ketat dari petugas pasar terhadap pedagang yang berjualan di luar tempat.

Kesimpulannya adalah bahwa Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren belum dilaksanakan secara optimal karena penempatan pasar tidak disarankan dengan baik, pengawasan petugas pasar belum dilakukan di setiap kegiatan pasar, pemberian sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang serta penyediaan tempat penyimpanan sampah dan lokasi parkir kendaraan yang tidak memadai. Saran peneliti adalah agar kios dan lapak ditempatkan sesuai dengan alur masuk pembeli, petugas harus memantau aktivitas di setiap kegiatan pasar, meningkatkan jumlah petugas pasar, dan memperbaiki area penyimpanan sampah serta lokasi parkir agar kegiatan pasar dapat berjalan dengan baik.

**Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pasar**

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

### ***Abstract***

*Market development cannot be separated from policy efforts in handling it by carrying out management, structuring and development as well as monitoring market activities, however this is still far from optimal so that market development is still not carried out in accordance with market development. The West Bandung District Department of Industry and Trade in its Modern Market Revitalization Activities in Padalarang District is inseparable from efforts to achieve policies including Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness and Accuracy in order to achieve successful market development. The research method used is a quantitative method with data collection techniques through observation, questionnaires, interviews and documentation.*

*The discussion of the Modern Market Revitalization Activity Program by the West Bandung District Department of Industry and Trade has not been optimal, where the arrangement for providing stall and kiosk locations has not been on target because it is far from where people shop. The research results show that the revitalization of the Modern Market in Padalarang District is not yet in accordance with the location desired by the community, so many traders sell in other locations because it is far from the reach of visitors, and there is no strict control and sanctions by market officials against traders who sell out of place.*

*The conclusion is that the Modern Market Revitalization Activity Program has not been implemented optimally due to the market placement not being properly advised, supervision of market officers not yet taking place in every market activity, providing sanctions for violations committed by traders as well as inadequate provision of waste storage and provision of vehicle parking locations. The researcher's suggestion is that the stalls and stalls should be placed according to the entry flow of buyers, officers should monitor activities at each market activity, increase the number of market officers and improve rubbish storage areas and parking locations so that market activities can run well.*

***Keywords: Evaluation, Policy, Market***

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Tujuan Negara Indonesia yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum. Sejalan dengan arus reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparatur pemerintah dapat mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Dengan otonomi daerah ini pemerintah daerah lebih bisa memainkan peran dan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing. Sementara itu peranan masyarakat dalam pembangunan juga dapat lebih ditingkatkan karena perlu disadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, pembangunan tidak bisa diselenggarakan secara maksimal. Melalui otonomi kebijakan pemerintah daerah mempunyai peluang yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi, yang lebih untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan di daerahnya masing-masing sehingga akan muncullah daya kreasi dan daya inovasi untuk dapat bersaing kearah kemajuan dengan daerah lain.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

Pengelolaan dan pengembangan pasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar di dalam area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survey deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan serta menggambarkan kenyataan yang ada. Pendekatan deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Metode Kualitatif suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajarnya mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu dicatat sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Kemudian untuk melengkapi sumber data maka dilakukan juga pendekatan kuantitatif berupa tabel frekuensi. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif.

## **Teknik Analisis Data**

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Pelaksanaan Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat dapat diketahui.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

## **KERANGKA TEORI**

Secara terminologi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Faried Ali (2011;19) apa yang disebut “Administrasi” adalah mengurus, mengatur, mengelola. Mengurus diarahkan pada penciptaan keteraturan sebab pengurusan yang teratur menghasilkan pencapaian tujuan yang tepat atau pada tujuan yang diinginkan. Mengatur diarahkan pada penciptaan keteraturan, serta mengelola diarahkan pada kegiatan yang berlangsung secara holistik.

Syafriz (2012;3) mengatakan administrasi dalam arti sempit adalah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/insitusi.

Zulkifli (2009;32) memandang administrasi sebagai suatu proses, aktivitasnya diawali oleh menetapkan suatu kebijakan, dan selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui proses kerjasama dari sekelompok orang untuuk mencapai sasaran atau sejumlah tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam studi administrasi, tujuan yang dimaksud itu adalah tujuan ideal (teoritis) setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efesiensi dalam sekuruh bidang kegiatan organisasi.

## **PEMBAHASAN**

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat). Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkann dalam hal mengambil kesimpulan.

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, dan wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

dalam menilai Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat). Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.**

	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
	Laki-Laki	20	38%
	Perempuan	32	62%
	Jumlah	52	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2024*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara perempuan dengan jumlah 32 responden atau sekitar 62%, hal ini disebabkan perempuan adalah responden yang banyak berperan dalam melakukan kegiatan Pasar.

**Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat)**

Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat dengan penetapan kebijakan Pengelolaan dan pengembangan pasar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha.

Pasar modern Tagog Kecamatan Padalarang merupakan pasar tradisional milik pemerintah daerah Kab Bandung Barat, pada tahun 2010 dimodernisasi atau dilakukan peremajaan dari pasar tradisional menjadi pasar modern yang kerjasama

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

---

antara pemerintah Kab Bandung Barat dengan PT Makmur Permata Putra Nomor 530/Bupati-KPR/2010/01 tentang Kerjasama Bangunan Guna Serah (BGS) Pasar Tagog Kecamatan Padalarang.

Unsur pemerintah daerah dalam pengelolaan pasar melalui Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah berdasarkan Peraturan Bupati Kab Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab Bandung Barat. Peraturan Daerah Kab Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023. Strategi dan kebijakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 6 tahun mengacu kepada RPJMD tahun 2016–2021.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bagaimana cara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai tujuan, sasaran jangka menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab Bandung Barat dan target kinerja hasil (*Outcome*), hal ini menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab Bandung Barat. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

tujuan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat.

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat.

### **Hambatan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat**

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat), meliputi :

1. Kurangnya kemampuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat dalam penataan pasar sesuai dengan penempatan para pedagang.
2. Kurangnya jumlah pegawai secara khusus petugas pasar dalam pengelolaan pasar mulai dari penataan, pengawasan, dan pemberian pelayanan terhadap pengguna Pasar.
3. Kurangnya kerjasama petugas pasar dengan para pengguna pasar terkait pengembangan pasar.
4. Belum adanya ketetapan waktu kegiatan pengawasan oleh petugas pasar.
5. Belum adanya penerapan sanksi tegas bagi para pedagang terutama bagi pedagang yang tidak berjualan pada tempat yang telah disediakan.

### **KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil analisa penelitian diketahui bahwa Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat) dilihat dari indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan dapat dikategorikan cukup baik hal ini diketahui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Bandung Barat telah melakukan pengembangan pasar mulai dari penataan

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

bangunan kios, los bagi para pedagang, penyediaan fasilitas pasar, melakukan pengawasan kegiatan pasar dan pelayanan bagi keluhan masyarakat pengguna pasar namun hal ini belum maksimal dilaksanakan terutama dalam pengawasan kegiatan pasar sehingga masih banyak para pedagang yang tidak menempati lokasi jualan yang telah disediakan dan pedagang kaki lima yang masih ditemui dilokasi pasar sehingga mengganggu kegiatan aktivitas pasar serta masih kurangnya penyediaan fasilitas tempat penampungan sampah, penyediaan lokasi parkir, hingga pemberian sanksi terhadap penyalagunaan ketetapan lokasi penempatan pasar.

2. Sementara hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren meliputi:

- a. Diketahui kurangnya jumlah petugas pasar yang seharusnya petugas pasar dapat ditemui dalam melaksanakan tugasnya ditempat setiap harinya.
- b. Kemampuan teknis petugas pasar yang dinilai masi lambat dalam menagani hambatan-hambatan yang terjadi dipasar seperti perbaikan jalan pasar, melengkapi penyediaan fasilitas pasar dan pentaan para pedagang.
- c. Diketahui belum adanya kegiatan rutin dalam penetapan kegaiatan pengawasan keberlangsungan kegiatan pasar.
- d. Petugas pasar belum bekerjasama dengan para pedagang dalam pengembangan pasar.
- e. Belum adanya kegiatan evaluasi terhadap pencapaian pengembangan pasar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung : Rineka Cipta.
- Ali, Faried. 2011. *Teori dan Konsep Administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefinisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Alamsyah, D. 2011. *Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- George. R. Terry. 2012. *Asas-asas Manajemen*. Cetakan tujuh. Bandung: PT. Alumni.

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

- 
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Hadari Nawawi 2005. *Manajemen Strategi*, Gadjah Mada Pers : Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: Refika Aditama.
- Indrastuti, Sri 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Pekanbaru, UR Press.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, april 1993
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk, 2005. *Kebijakan Dan Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta, YPAPI.
- Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 23-34.
- Mustopadidjaja AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Ndrah, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembagunan.
- Nurcholis, Hanif, 2005 *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia, Jakarta.
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Rasindo.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Simamora, Henry, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi ketiga, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Siagian, S.P. 2004. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Citra Bakti Aditia Media.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Filsafat Administrasi*, Jakarta, Raja Grafindo. dan Implementasi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Supriyono. 1985. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. BPFE : Yogyakarta.
- Syafi'I Inu Kencana. 2003. *Sistem administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Purohim Roup. 2012. *Manajemen Strategik*. Bogor, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.

*Received : 22 Okt 2024*

*Accepted : 22 Okt 2024*

*Published : 22 Okt 2024*

---

Syafri, Wirman. 2012